

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2016-2020)**

Ratih Atri Rahma Putri, Ontot Murwanto
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ratihatri16@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and examine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures with Economic Growth as a moderating variable. The population in this study was 38 regencies/cities in East Java Province. The data used in this research is secondary data. This research data was collected from the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report and Regency / City Gross Regional Domestic Product (GRDP) Data in East Java province for 5 (five) consecutive years in the 2016-2020 period obtained from BPK representatives of East Java Province and the BPS East Java website. The sampling technique in this study used a purposive sampling method, where the sample was based on predetermined criteria. The number of samples in this study was 170 observational data. The results of this study indicate that Regional Original Income, Special Allocation Funds, and Economic Growth have an effect on Capital Expenditures. Meanwhile, the General Allocation Fund has no effect on Capital Expenditures. And Economic Growth cannot moderate Local Original Income, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds for Capital Expenditures.

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure, and Economic Growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Pengambilan data penelitian ini dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut pada periode 2016-2020 yang diperoleh dari BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur dan website BPS Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dimana sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 170 data pengamatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Serta Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

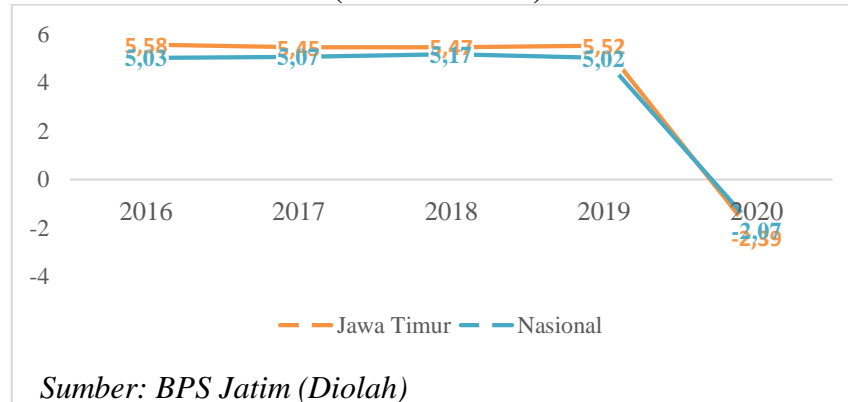
Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya dan perubahan bentuk pemerintahan yang dulunya sentralisasi menjadi struktur pemerintahan yang terdesentralisasi karena adanya perubahan politik dan administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 yang menggantikan UU No. 32 tahun 2004 berkaitan dengan Otonomi Daerah atau Desentralisasi menjelaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengendalikan daerahnya dengan tetap mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya otonomi daerah yaitu agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat, yaitu dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang dihasilkan, dalam hal ini termasuk semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan untuk penyelenggaraan urusan daerah tersebut baik urusan wajib maupun urusan pilihan yaitu untuk menjelaskan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Sumber pendapatan suatu daerah adalah PAD, dana transfer atau dana perimbangan yaitu meliputi DAU dan DAK. PAD merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah yang diperoleh suatu daerah tersebut, sedangkan DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kebijakan otonomi daerah. DAU yang diberikan untuk memberikan manfaat finansial yang merata seragam dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. DAK yang di dapatkan dari Penerimaan APBN yang diberikan untuk daerah terpilih dengan tujuan membiayai sesuai keperluan daerah yang seragam dengan program nasional. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dilaksanakannya otonomi daerah tersebut menyebabkan adanya perbedaan besaran sumber daya daerah pada setiap daerah sehingga setiap daerah memiliki potensi yang tidak sama. Perbedaan tersebut mengakibatkan ada daerah yang dapat membiayai pengeluaran daerahnya masing-masing dan ada juga yang mengalami kekurangan sehingga cenderung memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Sukirno (2011) Pertumbuhan Ekonomi yaitu perkembangan kegiatan pada perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Meningkatnya perekonomian daerah yaitu disertai dengan penerimaan daerah yang meningkat, seharusnya dapat meningkatkan Belanja Modal daerah. Begitu sebaliknya dengan menurunnya perekonomian daerah dapat disebabkan dengan penerimaan daerah yang menurun, yang seharusnya juga menyebabkan penurunan Belanja Modal Daerah. Diketahui bahwa besarnya Pertumbuhan Ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperlemah maupun memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini ditambahkan menjadi variabel pemoderasi.

**Gambar Laju Pertumbuhan Ekonomi Jatim dan Nasional dari Tahun ke Tahun
(Dalam Persen)**



Berdasarkan grafik laju pertumbuhan ekonomi Jatim dan Nasional dari tahun ke tahun, yaitu dalam kurun waktu 2016-2019 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada tahun 2020 menurun tajam yaitu berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disebabkan karena sektor unggulan daerahnya terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Dengan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dalam penelitian ini apakah pertumbuhan ekonomi yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai variabel memoderasi justru dapat memperkuat atau sebaliknya dapat memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Dari hasil penelitian sebelumnya Jaeni dan Anggana L (2016) menemukan PAD berpengaruh terhadap BM sedangkan Adyatma dan Oktaviani (2015) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap BM. Penelitian yang dilakukan Siti *et al.* (2021) menemukan DAU berpengaruh terhadap BM sedangkan Pratama *et al.* (2017) menemukan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap BM. Penelitian yang dilakukan Pratama *et al.* (2017) menemukan bahwa DAK berpengaruh terhadap BM sedangkan Jaeni dan Anggana L (2016) menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap BM. Adanya perbedaan atau inkonsistensi hasil temuan tersebut juga merupakan salah satu yang menjadikan celah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas bagaimana penerimaan daerah yang diantaranya PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, (2) apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, (3) apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, (4) apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal, (5) apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (6) apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (7) apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (2) untuk mengetahui dan menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (3) untuk mengetahui dan menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (4) untuk mengetahui dan menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal, (5) untuk mengetahui dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah

terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Moderasi, (6) untuk mengetahui dan menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Moderasi, (7) untuk mengetahui dan menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Definisi akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat transaksi keuangan, mengolah data transaksi, dan menyajikan informasi ekonomi yang digunakan untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pemakai informasi tersebut).

Akuntansi Manajemen

Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang intergal atau menyeluruh. Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial (*managerial accounting*) merupakan penyediaan informasi akuntansi bagi pengguna internal di perusahaan. Akuntansi manajemen dapat merangkum data yang beragam dari berbagai fungsi organisasi menjadi satu laporan sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2005) akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan masyarakat pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Tujuan dari akuntansi sektor publik yaitu memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian manajemen (*management control*) dan pertanggungjawaban terkait akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi manajemen sektor publik merupakan akuntansi yang mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditunjukkan pada pimpinan dengan tujuan sebagai perencanaan (strategik, pemberian informasi biaya, dan penilaian kinerja) dan pengendalian (mengukur pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian target yang sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Menurut Mardiasmo (2018) peran utama dari akuntansi manajemen pada organisasi sektor publik yaitu memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa LKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca/Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 1 Nomor 47, menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum yaitu sarana dalam mengatasi ketimpangan antar daerah serta disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 1 Nomor 48, menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yaitu khususnya memperbaiki kerusakan infrastruktur. Dana Alokasi Khusus ditetapkan pemerintah dalam tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Menurut Sukirno (2011) Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan pada perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Peningkatan perekonomian daerah atau untuk tingkat wilayah, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan ukuran

produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode.

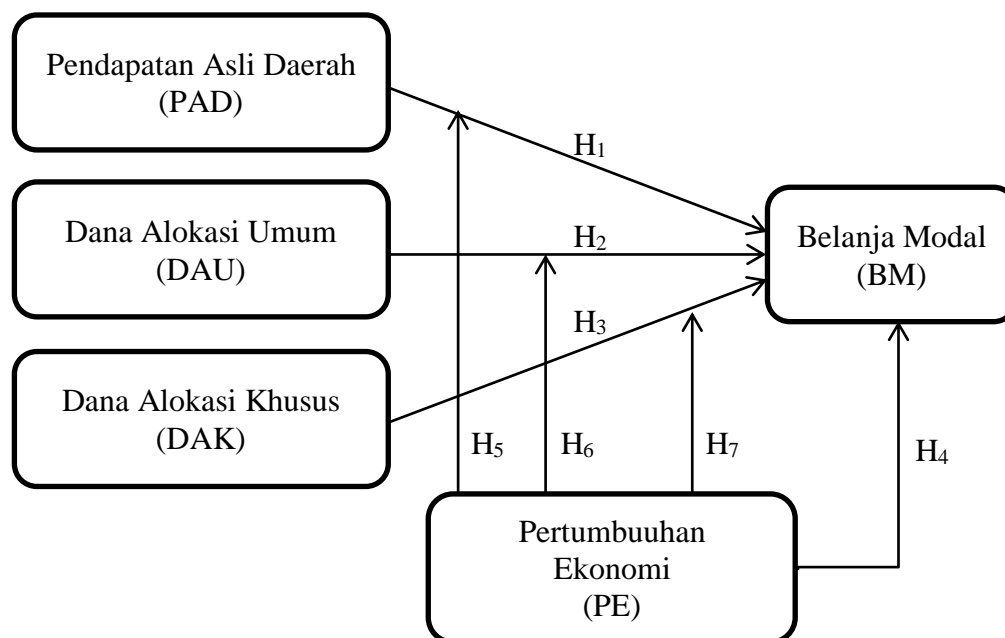
Belanja Modal (BM)

Belanja Modal yaitu suatu pengeluaran yang memiliki sifat pengeluaran rutin. Menurut Halim dan Kusufi (2014:107) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut PSAP No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan Jaeni dan Anggana L (2016) menemukan bahwa PAD dan PE berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun, DAK tidak berpengaruh terhadap BM. Sedangkan, tingkat pertumbuhan ekomonominya ternyata terbukti memperkuat pengaruh PAD terhadap BM. Juniawan dan Suryatini (2018) menemukan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap BM. Prabawati dan Wany (2017) menemukan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan DBH tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal. DBH berpengaruh dan mampu dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal. Namun, PAD dan DAU tidak berpengaruh dan tidak mampu dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi belanja modal. PAD, DAU, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi. Adyatma dan Oktaviani (2015) menemukan bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan PAD dan DAU dengan Belanja Modal.

KERANGKA KONSEPTUAL



HIPOTESIS

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H₄ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H₅ : Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

H₆ : Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

H₇ : Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017). Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) yang digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan yaitu antara dua variabel atau lebih, sehingga dengan penelitian ini dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah variabel.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020 serta Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode 2016-2020 yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:144). Kriteria penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020 dan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020 yang mengalami pertumbuhan ekonomi selama periode tahun penelitian.

Definisi Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada tiga yaitu variabel independen (bebas) yang meliputi variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

Khusus; variabel dependen (terkait) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Belanja Modal; serta variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penelitian ini variabel Pertumbuhan Ekonomi juga digunakan sebagai variabel independen (bebas) yaitu untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.

Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengukur nilai indikator variabel PAD dapat diukur dengan:

PAD = Pajak Daerah (PD) + Retribusi Daerah (RD) + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) + Lain-lain PAD yang Sah (LPADS)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Formula “DAU” yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar dapat dihitung menggunakan konsep:

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) (Kebutuhan Fiskal-Kapasitas Fiskal)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Untuk perhitungan DAK dapat dihitung dengan indeks berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Umum (KU)

$KU = (PAD + DAU + DBH - DBH DR) - \text{Belanja Gaji PNSD}$

b. Kriteria Khusus (KK)

Kriteria Khusus dalam perhitungan DAK berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK, serta berdasarkan karakteristik daerah yang meliputi: daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan nagara lain, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

c. Kriteria Teknis (KT)

Berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat memnggambarkan kondisi sarana serta prasarana yang akan didanai DAK.

Belanja Modal (BM)

Adapun perhitungan untuk Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Belanja Modal (BM) = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan

Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap + Belanja Aset Tetap Lainnya

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

Proses Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dengan menggunakan dua cara yaitu analisis grafik *Normal Probability Plot* dan *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, serta uji heteroskedastisitas.

Teknik Pengujian Hipotesis dan Analisis Data

Teknik pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan uji hipotesis (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Ibu kota provinsi Jawa Timur berada di Surabaya. Secara administratif Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 Kabupaten/Kota yang terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota, sehingga Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia. Struktur organisasi dalam Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat Daerah dengan 11 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, Inspektorat, 1 Badan, 12 Lembaga Teknis Daerah, 4 Lembaga lain, dan 5 Rumah Sakit Daerah.

Deskriptif Objek Penelitian

Dalam objek penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini, data didasarkan pada laporan keuangan Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Namun, berdasarkan data LHP atas LKPD yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prov. Jawa Timur tidak semua daerah memiliki data yang lengkap. Diketahui bahwa ada 4 daerah Kabupaten/Kota yang LHP atas LKPD datanya tidak lengkap yaitu Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017, Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018, dan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti hanya 34 Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 26 Kabupaten dan 8 Kota.

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TPAD	170	330958.45	2319896.60	633989.3738	328427.77307
TDAU	170	611472.57	1314592.98	958344.5162	151636.56038
TDAK	170	242288.77	771768.15	517703.9672	118545.88676
TPE	170	.66	.85	.7327	.02552
TBM	170	293277.04	1659609.84	627554.5083	212561.22036
Valid N (listwise)	170				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

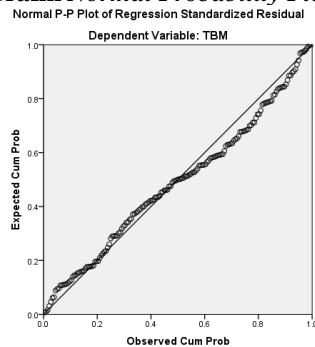
Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa penelitian ini terdapat 170 data pengamatan yang digunakan serta hasil statistik deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan Analisis Grafik *Normal Probability Plot*

Uji Normalitas dengan Analisis Grafik *Normal Probability Plot*



Sumber: Hasil Output SPSS,

Dapat dilihat bahwa titik-titik yang terdapat pada Analisis Grafik *Normal Probability Plot* penyebarannya tidak menjauhi garis diagonal dan menyebar mengikuti arah garis diagonal, hal tersebut menunjukkan bahwa data yang diuji terdistribusi dengan normal.

Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*

Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

<i>Unstandardized Residual</i>		
N		170
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	100853.35288413

	<i>Absolute</i>	.077
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	.077
	<i>Negative</i>	-.046
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.998
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.272

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Yang menunjukkan *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah $0,272 > 0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil data tersebut yang telah diuji terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
<i>(Constant)</i>		
TPAD	.802	1.246
1 TDAU	.156	6.410
TDAK	.167	5.985
TPE	.967	1.034

a. *Dependent Variable: TBM*

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,802; Dana Alokasi Umum sebesar 0,156; Dana Alokasi Khusus sebesar 0,167; dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,967. Untuk nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,246; Dana Alokasi Umum sebesar 6,410; Dana Alokasi Khusus sebesar 5,985; dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,034. Sehingga dapat diketahui memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ serta memiliki nilai $VIF \leq 10$, hal tersebut menunjukkan bahwa data yang diuji tidak terindikasi adanya multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Durbin-Waston (DW)

<i>n</i>	<i>k=1</i>		<i>k=2</i>		<i>k=3</i>		<i>k=4</i>	
	<i>dL</i>	<i>dU</i>	<i>dL</i>	<i>dU</i>	<i>dL</i>	<i>dU</i>	<i>dL</i>	<i>dU</i>
169	1.7365	1.7603	1.7245	1.7724	1.7124	1.7846	1.7002	1.7970
170	1.7373	1.1609	1.7254	1.7730	1.7134	1.7851	1.7012	1.7975
171	1.7381	1.7616	1.7262	1.7735	1.7143	1.7856	1.7023	1.7979

Berdasarkan tabel *Durbin-Waston* (DW) dapat diketahui nilai *dL* 1,7012 dan nilai *dU* 1,7975.

Uji Autokorelasi dengan Metode

Cochrane-Orcutt

Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	1.839

a. *Predictors: (Constant), Lag_TPE, Lag_TDAK, Lag_TPAD, Lag_TDAU*

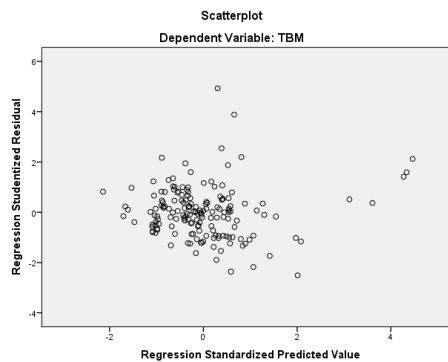
b. *Dependent Variable: Lag_TBM*

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Dari hasil uji autokorelasi dengan metode *Cochrane-Orcutt* dapat diketahui bahwa nilai d (*Durbin Waston*) sebesar 1,839 lebih besar dari batas atas dU sebesar 1,7975 dan nilai dU lebih kecil dari $(4 - d) = 4 - 1,839 = 2,161$ atau sesuai dengan ketentuan *Durbin-Waston*, yaitu $d > dU$ dan $(4 - d) > dU$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian autokorelasi dengan metode *Cochrane-Orcutt* ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Plot (*Scatterplot*)



Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Dari hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang teratur dan jelas serta menyebar secara acak, dan dapat dilihat pada Grafik Plot (*Scatterplot*) tersebut titik-titik tersebar berada di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pada penelitian ini bebas dari masalah heroskedastisitas atau terjadi hemokedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis (uji t)

Uji Hipotesis (Uji t) Model 1 Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
(<i>Constant</i>)	-6.155	.000
TPAD	16.531	.000
1 TDAU	1.140	.256
TDAK	2.216	.028
TPE	6.241	.000

a. *Dependent Variable: TBM*

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Pada uji hipotesis (uji t) model 1 dapat diketahui t_{hitung} Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,531; Dana Alokasi Umum sebesar 1,140; Dana Alokasi Khusus sebesar 2,216; dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,241. Untuk nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,000; Dana Alokasi Umum sebesar 0,256; Dana Alokasi Khusus sebesar 0,028. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan

H₁, H₃, dan H₄ diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan H₅ ditolak yang berarti Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji Hipotesis (Uji t) Model 2

Coefficients^a

	<i>Model</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	(Constant)	.120	.905
	TPAD	-.111	.911
	TDAU	-1.012	.313
2	TDAK	1.057	.292
	TPE	-.103	.918
	TPAD*TPE	.704	.482
	TDAU*TPE	1.061	.290
	TDAK*TPE	-.957	.340

a. *Dependent Variable: TBM*

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Pada uji hipotesis (uji t) model 2 dapat diketahui t_{hitung} Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal sebesar 0,704 dan nilai signifikansi 0,482; nilai t_{hitung} Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal sebesar 1,061 dan nilai signifikansi 2,90; serta nilai t_{hitung} Dana Alokasi Khusus sebesar -0,957 dan nilai signifikansi 0,340. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 yang berarti H₅, H₆, dan H₇ ditolak yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) Model 1

ANOVA^a

	<i>Model</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
	<i>Regression</i>	141.986	.000 ^b
1	<i>Residual</i>		
	<i>Total</i>		

a. *Dependent Variable: TBM*

b. *Predictors: (Constant), TPE, TPAD, TDAK, TDAU*

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Uji Simultan (Uji F) Model 2

ANOVA^a

	<i>Model</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
	<i>Regression</i>	80.863	.000 ^b
2	<i>Residual</i>		
	<i>Total</i>		

a. *Dependent Variable: TBM*

b. *Predictors: (Constant), TDAK*TPE, TPE, TPAD, TDAU, TPAD*TPE, TDAK, TDAU*TPE*

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan uji simultan (uji F) pada model 1 dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 141,986 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk uji F pada model 2 nilai F_{hitung} sebesar 80,863 dan nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan model regresi 1 dan model regresi 2 yang digunakan dalam penelitian ini layak dan memenuhi uji kelayakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.880 ^a	.775	.769

a. Predictors: (Constant), TPE, TPAD, TDAK, TDAU

b. Dependent Variable: TBM

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan uji koefisien determinasi (R^2) pada model 1 nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,769 atau 76,9% yang menunjukkan variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dan sisanya sebesar 23,1% ($100\% - 76,9\% = 23,1\%$) yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang di luar persamaan penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
2	.882 ^a	.777	.768

a. Predictors: (Constant), TDAK*TPE, TPE, TPAD, TDAU, TPAD*TPE, TDAK, TDAU*TPE

b. Dependent Variable: TBM

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan uji koefisien determinasi (R^2) pada model 2 nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,768 atau 76,8% yang menunjukkan variabel dependen yaitu Belanja Modal dipengaruhi variabel independen yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. Sisanya sebesar 23,2% ($100\% - 76,8\% = 23,2\%$) yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang di luar persamaan penelitian ini.

Analisis Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda Model 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-1412070.532	229433.023
TPAD	.441	.027
1 TDAU	.149	.131
TDAK	.359	.162
TPE	1952811.924	312891.508

a. Dependent Variable: TBM

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda model 1 diperoleh persamaan regresi linier berganda model 1 sebagai berikut:

$$\mathbf{BM = -1.412.070,532 + 0,441 PAD + 0,149 DAU + 0,359 DAK + 1.952.811,924 PE + e}$$

Dapat diketahui bahwa besarnya nilai konstanta (α) sebesar -1.412.070,532 yang menunjukkan bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi dinyatakan konstanta pada angka nol, sehingga nilai Belanja Modal sebesar -1.412.070,532. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,441; koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,149; koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,359; koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1.952.811,924. Dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi keempat variabel tersebut menunjukkan arah positif yaitu apabila variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi meningkat, maka variabel Belanja Modal memiliki kecenderungan akan meningkat.

Analisis Regresi Linier Berganda Model 2

Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>
(Constant)	183873.603	1531898.413
TPAD	-.083	.742
TDAU	-3.003	2.967
2 TDAK	3.857	3.651
TPE	-215070.593	2086367.767
TPAD*TPE	.711	1.010
TDAU*TPE	4.254	4.010
TDAK*TPE	-4.703	4.917

a. *Dependent Variable: TBM*

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Dari tabel analisis regresi linier berganda model 2 diperoleh persamaan regresi linier berganda model 2 sebagai berikut:

$$\mathbf{BM = 183.873,603 - 0,083 PAD - 3,003 DAU + 3,857 DAK - 215.070,593 PE + 0,711 PAD*PE + 4,254 DAU*PE - 4,703 DAK*PE + e}$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda model 2, maka dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,711 dan koefisien regresi Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,254. Hal tersebut menunjukkan arah positif antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan apabila Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi setiap penambah satu satuan, maka Belanja Modal akan memiliki kecenderungan meningkat. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar -4,703 yang menunjukkan arah negatif antara variabel Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal yang menunjukkan apabila Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi setiap penambah satu satuan, maka Belanja Modal akan memiliki kecenderungan menurun/berkurang.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t model 1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah sebagai membelanjakan modal yang digunakan untuk pengeluaran yaitu dalam hal pembelian/pengadaan atau pengembangan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat yaitu lebih dari dua belas bulan dengan tujuan untuk mendukung sarana dan prasarana publik yang baik dan meningkatkan pembangunan daerah. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang diperoleh. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka dapat memungkinkan daerah tersebut memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa perlu berharap kepada pemerintah pusat, yang berarti bahwa pemerintah daerah dapat mampu untuk mandiri terhadap manajemen keuangan transparansi dan akuntabel.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dapat dilihat pada hasil uji t model 1 menunjukkan nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Umum sebesar $0,256 > 0,05$, hal tersebut menunjukkan bahwa H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu diantaranya dapat dikarenakan adanya rentang nilai Dana Alokasi Umum yang sangat jauh pada setiap daerah, yang dapat dilihat dari hasil analisis statistik deskriptif pada nilai minimum dan maksimum. Hal lain yang menjadi indikasi Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal yaitu Dana Alokasi Umum lebih banyak digunakan dalam membiayai belanja operasi.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dari hasil uji t model 1 bahwa nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Khusus sebesar $0,028 < 0,05$ dalam hal ini sehingga H_3 diterima. Hal tersebut menunjukkan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan serta program nasional yang mampu meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, fasilitas publik melalui peningkatan Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang berasal dari bantuan pusat maka semakin tinggi juga besarnya Belanja Modal. Hal tersebut berarti Dana Alokasi Khusus lebih banyak digunakan dalam Belanja Modal yang digunakan sebagai pembangunan dan prasarana fisik terutama infrastruktur pada suatu daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t model 1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H_4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi pada suatu daerah akan merangsang dalam meningkatkannya pendapatan per kapita. Dapat diketahui apabila pemerintah daerah menetapkan suatu anggaran belanja pembangunan yang lebih besar dari pengeluaran rutin, maka dalam

kebijakan ekspansi anggaran daerah ini dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tersebut. Pengalokasian Belanja Modal digunakan sebagai pembangunan infrastruktur yaitu dalam penunjang perekonomian sehingga dapat mendorong tingkat produktifitas penduduk. Hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara umum tercermin dalam pendapatan per kapita. Penelitian ini sejalan dengan Jaeni dan Anggana L (2016), Masruroh *et al.* (2018) yang menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi

Penelitian ini menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dari hasil uji t model 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar $0,482 > 0,05$ sehingga H_5 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam menggunakan Belanja Modal untuk meningkatkan pembangunan daerah, maka dengan adanya pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat diketahui Pertumbuhan Ekonomi dalam hal ini tidak dapat menjadi faktor penentu terjadinya Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur belum maksimal sehingga walaupun peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas sudah tercapai. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mokhlas dan Purwati (2019) dan Pratama *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dari hasil uji t model 2 dengan nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal sebesar $0,290 > 0,05$ yang berarti H_6 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi belum mampu menguatkan atau melemahkan korelasi antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal yang dikarenakan fungsi Dana Alokasi Umum yaitu *equalization grant* sebagai menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan yang didapatkan oleh daerah dalam memandirikan daerah tersebut belum tercapai atau tidak menjadi lebih baik atau pun yang terjadi sebaliknya yaitu daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menggantungkan keuangan daerahnya dengan Dana Alokasi Umum.

Pengaruh Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi

Pada penelitian ini menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dari hasil uji t model 2 dengan nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal sebesar $0,340 > 0,05$ yang berarti H_7 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang bersifat *special grant* oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tidak memperhatikan terjadinya Pertumbuhan Ekonomi yang berarti jika suatu daerah sudah mencapai target

Pertumbuhan Ekonomi yang baik atau pun ideal, Dana Alokasi Khusus yang didapatkan pemerintah daerah masih tetap, lebih atau berkurang dari pagu anggaran tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratama *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini yang mengarah kepada manfaat penelitian secara nyata maka implikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya sumber pemasukkan salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur serta fasilitas publik yang sesuai dengan keperluan di daerah Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mengutamakan pengalokasian Belanja Modal yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah tersebut.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan yang harus dilakukan oleh penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: penelitian ini hanya menguji 3 variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DAK; sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020; serta sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya 34 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2016-2020 yang telah diuraikan, sehingga dapat disimpulkan: (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal; (2) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal; (3) Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Saran

Berdasarkan implikasi dan hasil temuan penelitian ini maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu: penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel independen yang lain. Karena berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat diketahui masih ada variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi Belanja Modal, sedangkan untuk variabel dependen penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan lebih dari satu variabel dependen. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel pada wilayah Provinsi yang lain, sehingga dapat dilakukan komparasi dengan Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, Erdi dan Oktaviani, Rachmawati Meita. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4(2), hal.190-205.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran 2016-2020*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Bastian, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Edisi ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Baswir. 2015. *Pengertian Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Erlina et al. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaeni, G dan Anggana, L. 2016. Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 5(1):13-26.
- Juniawan, M. A., dan Suryatini, N. P. 2018. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281*.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Masruroh et al. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. *Simki-Economic Vol. 2, No. 1*.
- Mokhlas dan D. I. Purwati. 2019. Memoderasikah Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal? (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Management & Business Vol. 2, No. 1*.
- Prabawati, P. S. S., dan E, Wany. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanj Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 1-17.
- Pratama et al. 2017. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *JOM Fekon, Vol. 43 No.1*.
- Purwaji et al. 2017. *Pengantar Akuntansi: Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan anantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah.*
- Reyowijoyo, M. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Npn Laba Edisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit Citra Wacana Media.
- Siregar *et al.* 2014. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti *et al.* 2021. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *JIMEA Vol. 5 No. 2*.
- Soesilo, A. F. dan N. F. Asyik. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 10(4):1-21*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.